

**RENCANA KERJA (RENJA)
SEMESTA BERENCANA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
BALI
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Atas Asung Kertha Waranugraha dan dengan mengucapkan Puja Astuti Anghayu Bagia dihadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 merupakan Rencana Kerja Tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2024-2026 yang mengacu pada RPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2024-2026, sehingga pembangunan dibidang Kelautan dan Perikanan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan terukur baik kuantitatif maupun kualitatif. Keberhasilan akan dapat dicapai, apabila dalam melaksanakan program/kegiatan pemerintah dan pembangunan, mempunyai acuan yang jelas dan mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Kami menyadari bahwa Rencana Kerja ini belum sempurna karena keterbatasan dalam penyusunan nya, untuk itu diharapkan masukan dari berbagai pihak sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang direncanakan.

Denpasar, 04 Agustus 2023

**Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Bali**



I. PUTU SUMARDIANA, MP

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19670714 199403 1 003

DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024	8
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI TAHUN LALU.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	10
2.1.1 Produksi Perikanan Tangkap	10
2.1.2 Produksi Perikanan Budidaya	11
2.1.3 Kawasan Konservasi yang di Kelola	12
2.1.4 Produk Perikanan Bersertifikat (SKP).....	13
2.1.5 Konsumsi Ikan	14
2.1.6 Cakupan Bina Kelompok Nelayan.....	14
2.1.7 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan.....	14
2.1.8 Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	15
2.1.9 Nilai Tukar Nelayan	15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3 Review terhadap RKPD	17
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	17
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	20
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	20
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah	20
3.3 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan	21
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI	22
BAB V PENUTUP.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan disektor Kelautan dan Perikanan memiliki peranan yang sangat strategis terhadap pembangunan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi, pendapatan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, pemberdayaan masyarakat pesisir, penyerapan tenaga kerja, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan konsumsi ikan, memperkuat ketahanan pangan, serta menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan hidup, sebagaimana amanat pemerintah pusat, setiap pembangunan haruslah mengacu pada prinsip *Money Follow Function* diubah menjadi *Money Follow Program* serta menggunakan pendekatan holistik, tematik, terintegrasi dan spasi.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi pembangunan kelautan dan perikanan yang ditempuh Optimalisasi Produktivitas Perikanan Budidaya, Pemasaran dan peningkatan mutu hasil perikanan, Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN), Pemberdayaan masyarakat pesisir, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan, Optimalisasi Produktivitas Perikanan Tangkap, dan Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pembangunan kelautan dan perikanan ke depan lebih ditekankan pada pengendalian perikanan tangkap, pengembangan budidaya perikanan dan peningkatan nilai tambah melalui perbaikan mutu dan pengembangan produk yang mengarah pada pengembangan industri kelautan dan perikanan yang terpadu berbasis masyarakat.

Untuk itu, kebijakan operasional pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan adalah Pengembangan perikanan budidaya berbasis kawasan dan komoditi, Fasilitasi pengembangan

usaha, sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran produk hasil perikanan, Pengembangan budaya makan ikan (GEMARIKAN), Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Konservasi dan rehabilitasi sumber daya kelautan dan perikanan serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Fasilitasi pengembangan usaha, sarana dan prasarana perikanan tangkap, dan Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS).

Dalam pasal 11 disebutkan Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah; selanjutnya dalam ayat (3) dinyatakan Rencana Perangkat Daerah, terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Sementara dalam pasal 1 ayat 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali dalam jangka waktu satu tahun yaitu tahun 2024. Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2024 diajukan untuk mempertajam program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif berdasarkan program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi, Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2024 diverifikasi oleh Bappeda Provinsi Bali selanjutnya diajukan untuk mendapat pengesahan dari Gubernur Bali.

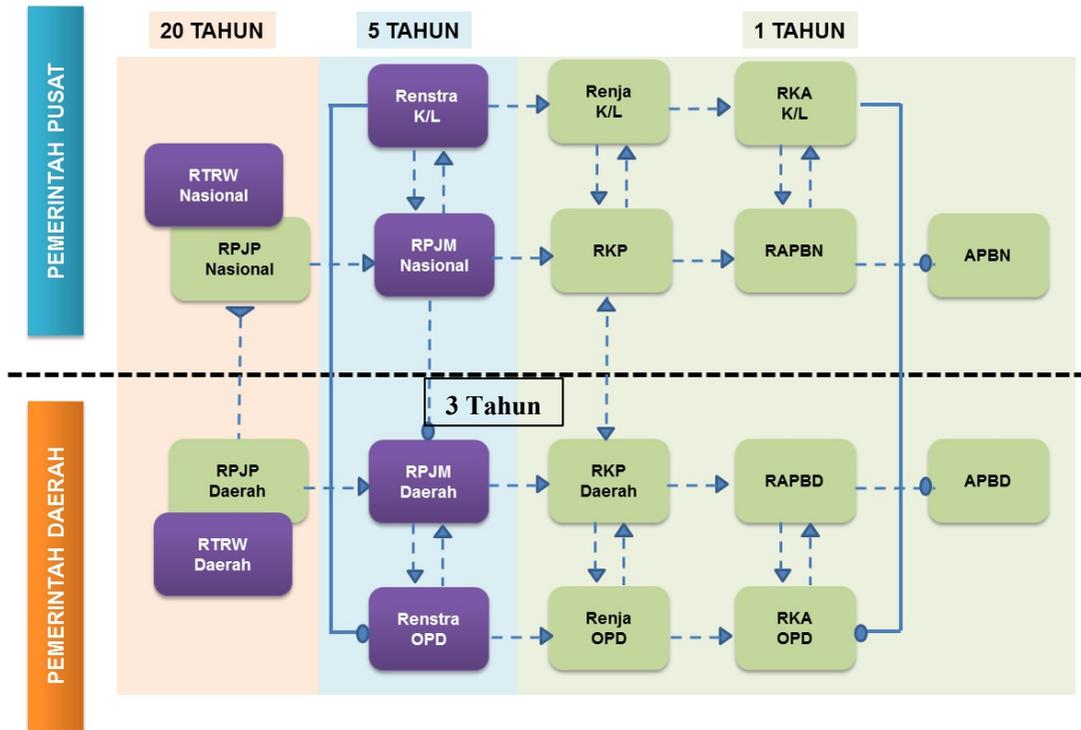
Terkait dengan proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2024 pada bulan Juli Tahun 2023, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2024-2026, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 serta hasil evaluasi RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 diawali dengan mengajukan keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah, selanjutnya orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Penyusunan keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah diajukan melalui Bappeda Provinsi Bali. Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah dilakukan secara internal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan mengundang Bappeda Provinsi Bali dengan materi orientasi meliputi tugas pokok dan fungsi Tim Penyusun Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024, penyamaan persepsi tentang tata cara penyusunan Renja Perangkat daerah dan kesiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Diagram 1.1

Hubungan Dokumen Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Mengacu pada gambar di atas dapat dijelaskan secara rinci hubungan dokumen Renja PD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Renja PD mengacu pada RKPD sebagai dampak adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi, dengan mengacu pada Renstra PD, Renja PD dan KUA/PPAS menjadi pedoman penyusunan RKA SKPD, selanjutnya akan menjadi acuan DPA PD, yang merupakan penjabaran dari APBD.

1.2 Dasar hukum

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembar Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);
19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 22);
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

1.3 Maksud dan Tujuan

Sebagaimana diuraikan di Atas bahwa maksud penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 adalah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 khususnya Rencana Kerja Tahun 2024 serta sebagai bahan masukan pada penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2024 dan setelah RKPD ditetapkan, maka Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali 2024 akan disesuaikan pada RKPD tersebut.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali 2024 adalah :

1. Menjabarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 terutama pada tahun 2024;
2. Merancangan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tahun 2024;
3. Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 dengan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026;

4. Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 dengan RKPD tahun 2024.

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I diuraikan tentang pengertian Renja, hubungan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, Landasan Hukum memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. Pada Maksud dan Tujuan; memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali. Sistematika Penulisan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali; Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab II Tentang Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu berisi : 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, 2) Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, 3) Review terhadap RKPD, dan 4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

Pada Bab III Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali diuraikan hal-hal sebagai berikut : 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, 2) Tujuan dan Sasaran Renja Dinas

Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, dan 3) Program dan Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

Bab IV Renja Perangkat Daerah; diuraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

BAB V PENITUP

Bab V Penutup; Pada bab ini diuraikan antara lain :Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI TAHUN LALU

Dalam BAB II Tentang Hasil Evaluasi Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Lalu berisi : 1) Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, 2) Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, 3) Review terhadap RKPD, dan 4) Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2022 melaksanakan urusan Pemerintahan yaitu Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Urusan Kelautan dan Perikanan merupakan Urusan Pilihan; dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka Urusan Kelautan dan Perikanan tetap dinyatakan sebagai Urusan Pilihan.

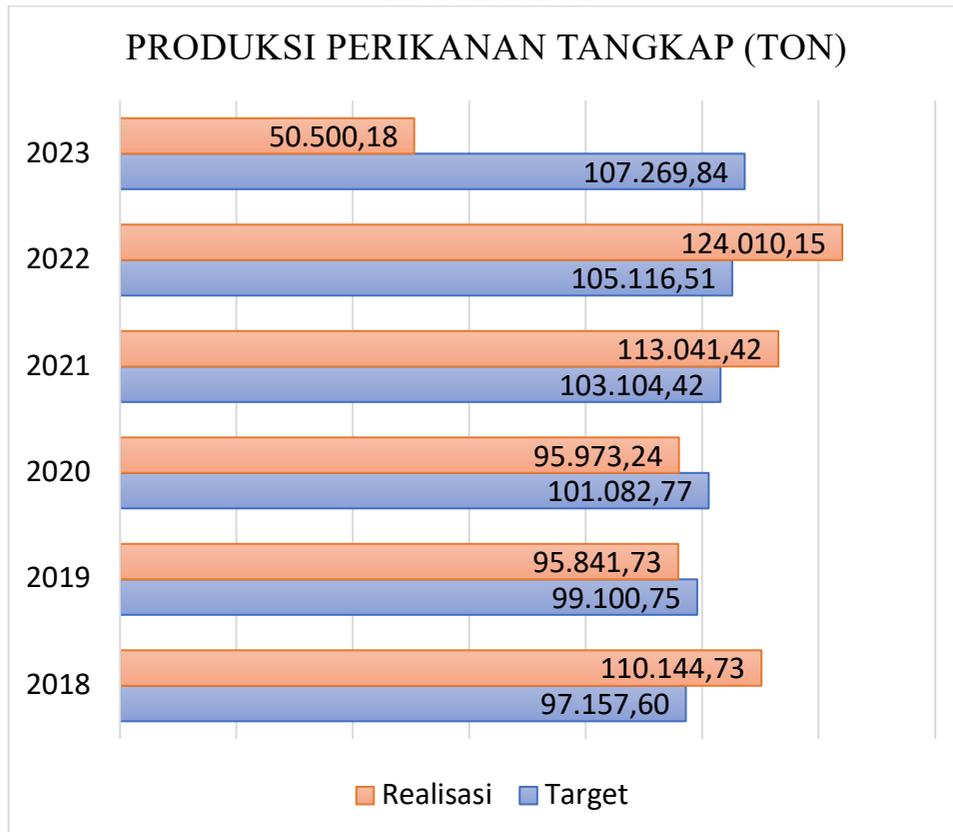
2.1.1 Produksi Perikanan Tangkap

Produksi Perikanan Tangkap tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 124.010,15 Ton dari target produksi 105.116,51 Ton sudah melampaui capaian sebesar 118%, sedangkan produksi perikanan tangkap terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 95.841,73 Ton dari target 99.100,75 dengan capaian 97%. Pada Tahun 2018 target Produksi Perikanan Tangkap sebesar 97.157,60 Ton sudah terealisasi sebesar 110.144,73 Ton (113%), untuk tahun 2020 dari target 101.082,77 Ton sudah terealisasi sebesar 95.973,24 Ton (95%). Sedangkan untuk tahun 2021 target produksi perikanan tangkap sebesar 103.104,42 Ton dan sudah terealisasi sebesar 113.041,42 Ton

atau sebesar 110%. Pada tahun 2023 sampai bulan Agustus dari target 107.269,84 realisasi produksi perikanan tangkap sebesar 50.500,18 Ton atau 27%.

Adanya penurunan realisasi jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2019 dan 2020 akibat Cuaca Ekstrem.

Gambar 2.1
Produksi Perikanan Tangkap Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali

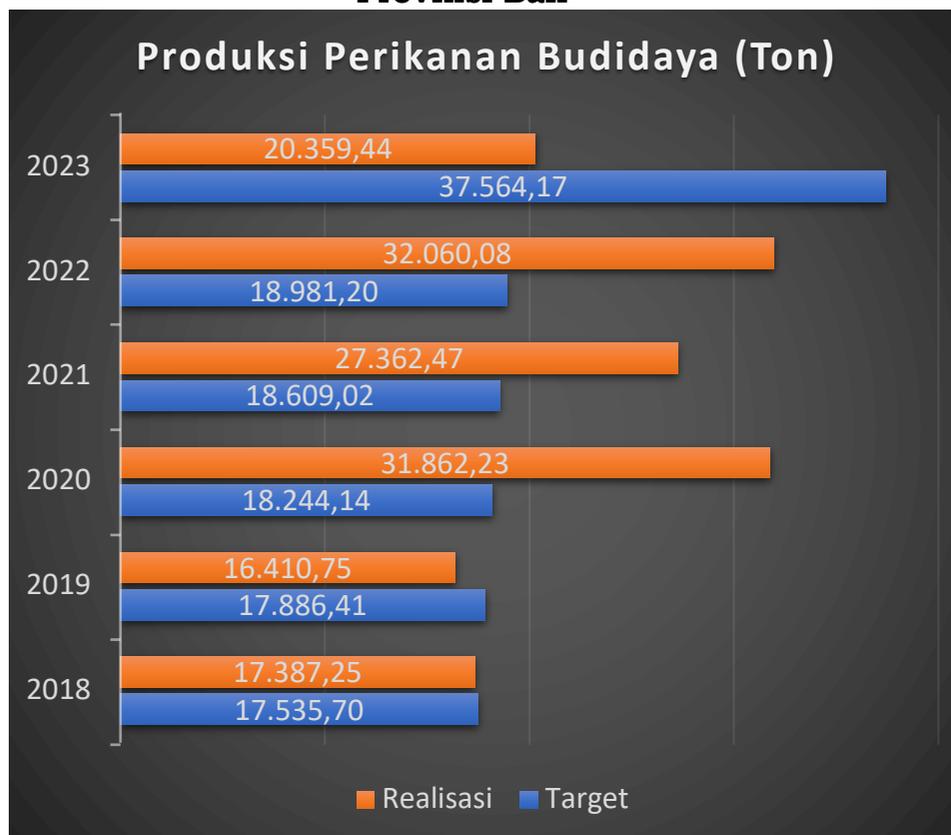


2.1.2 Produksi Perikanan Budidaya

Produksi Perikanan Budidaya tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 32.060,08 Ton dari target produksi 18.981,20 Ton sudah melampaui capaian sebesar 169%, sedangkan produksi perikanan budidaya terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu 16.410,75 Ton dari target 17.886,41 sudah tercapai 92%. Pada Tahun 2018 target Produksi Perikanan Budidaya sebesar 17.535,70 Ton sudah terealisasi sebesar 17.387,25 Ton (99%), untuk tahun 2020 dari target 18.244,14 Ton sudah terealisasi sebesar 31.862,23 Ton (175%). Sedangkan untuk tahun 2021 target produksi perikanan budidaya sebesar 18.981,20 Ton dan sudah terealisasi sebesar 27.362,47 Ton atau sebesar 147%. Pada tahun 2023 sampai dengan bulan sampai bulan Agustus dari target 37.564,17 realisasi produksi perikanan tangkap

sebesar 20.359,44 Ton atau 54%. Adanya penurunan realisasi jumlah produksi perikanan budidaya akibat Penurunan kualitas lingkungan, Cuaca lingkungan ekstrem, Serangan hama penyakit ikan, Ketersediaan benih terbatas.

Gambar 2.2
Produksi Perikanan Budidaya Sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Bali

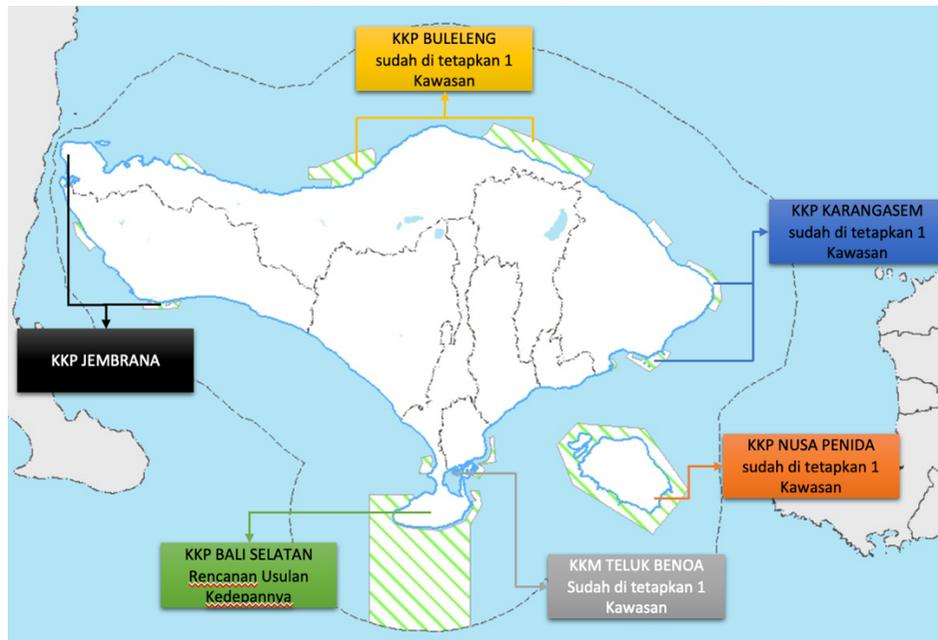


2.1.3 Kawasan Konservasi yang di Kelola

Dari target 5 Kawasan Konservasi Perairan yang akan ditetapkan kurun waktu tahun 2018-2023 sudah tercapai 4 Kawasan. Pada tahun 2018 sudah ditetapkan 1 Kawasan (KKP Nusa Penida) kemudian di tahun 2019 sudah ditetapkan Kawasan Konservasi Maritim (KKM Teluk Benoa). Penetapan kawasan konservasi di perairan buleleng, dan di perairan Karangasem sudah ditetapkan pada tahun 2023. Dan selanjutnya sedang dilakukan penyusunan dokumen untuk bahan penetapan Kawasan Konservasi yang belum di tetapkan (Kawasan Konservasi di Perairan Jembrana).

Rencana KKP Bali Selatan akan di usulkan kedepannya sehingga Jumlah Kawasan Konservasi yang di Kelola berubah dari 5 Kawasan menjadi 6 Kawasan.

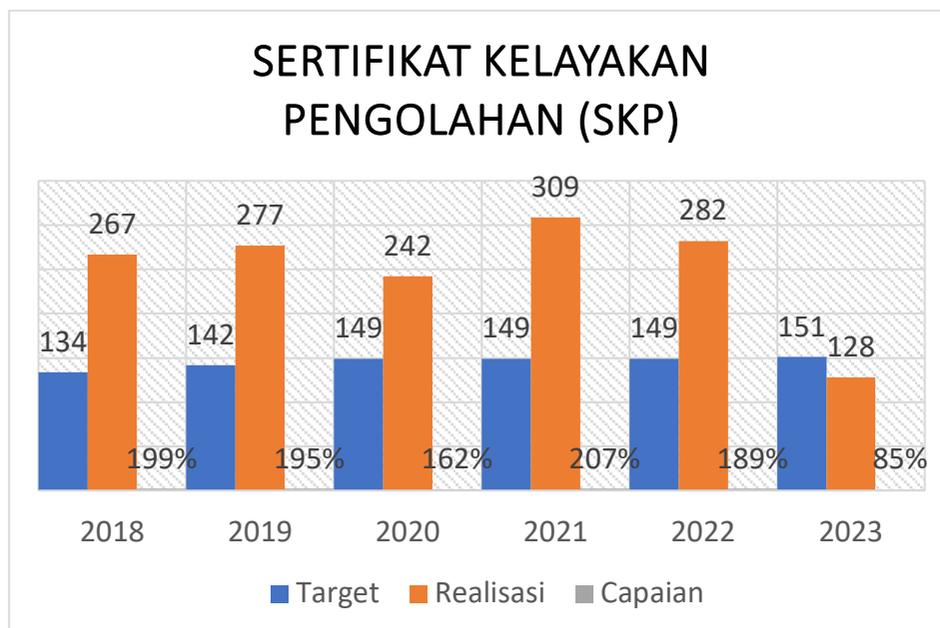
Gambar 2.3
Peta Kawasan Konservasi Provinsi Bali



2.1.4 Produk Perikanan Bersertifikat (SKP)

Produk perikanan bersertifikat mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 267 SKP menjadi 277 SKP pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 242 SKP kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi sebesar 309 SKP dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 282. Pada tahun 2023 (sampai dengan bulan September) Capaian program ini sudah mencapai 85% atau sebesar 128 SKP dari yang di targetkan sebesar 151 SKP pada akhir tahun 2023.

Gambar 2.4
Sertifikat Kelayakan Pengolahan



2.1.5 Konsumsi Ikan

Tingkat konsumsi ikan mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 33,26 kg/kapita/tahun menjadi 31,77 kg/kapita/tahun pada tahun 2019. Namun Kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 38,83 kg/kapita/tahun sampai pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 46,63 kg/kapita/tahun.

Tabel 2.1
Tingkat Konsumsi Ikan

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Konsumsi ikan (kg/kapita/th)	33,26	31,77	38,83	44,81	46,63

2.1.6 Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan bina kelompok nelayan dari tahun 2018-2022 sebesar 70%. Namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 100% sampai dengan tahun 2022.

Tabel 2.2
Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	70	70	70	100	100

2.1.7 Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi perikanan kelompok nelayan terus mengalami penurunan dari 67,44% pada tahun 2018 menjadi 65,10% pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 78,33% dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 70,94%.

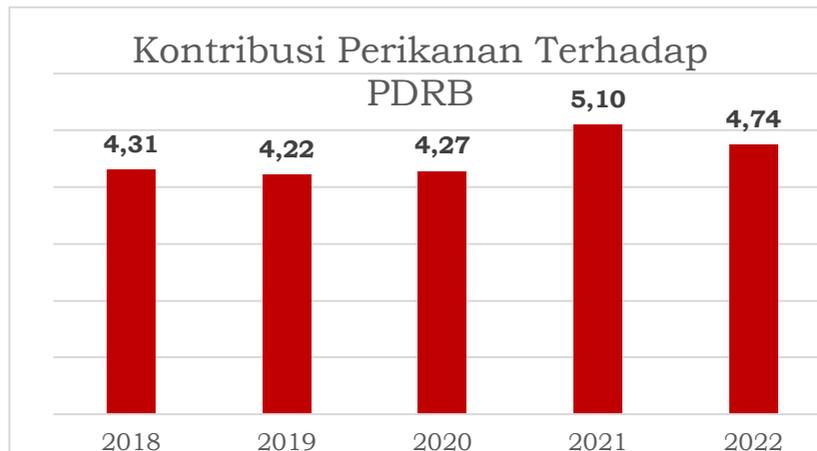
Tabel 2.3
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (%)	67,44	66,32	65,10	78,33	70,94

2.1.8 Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 4,31% menjadi 4,22% pada tahun 2019 kemudian mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2021 sebesar 5,10%. Namun kembali mengalami penurunan sebesar 4,74% pada tahun 2022.

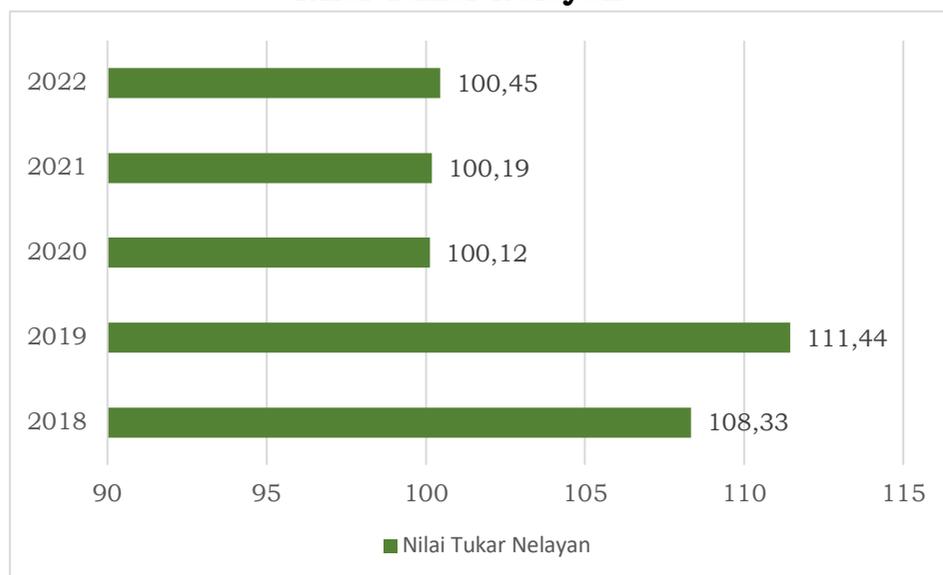
Gambar 2.5
Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB Provinsi Bali



2.1.9 Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 111,44% dibandingkan dengan tahun 2018 Nilai Tukar Nelayan mengalami peningkatan dari 108,33% pada tahun 2018 menjadi 111,44% pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 100,12%. Namun pada tahun berikutnya terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 meningkat menjadi 100,45%.

Gambar 2.6
Nilai Tukar Nelayan



Pada tahun 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dalam upaya mewujudkan visi dan misi Provinsi Bali dalam Urusan Kelautan dan Perikanan melaksanakan 5 Program, 8 Kegiatan dan 13 Sub Kegiatan. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 sebagai hasil pelaksanaan Renstra tahun keempat akan diuraikan secara detail pada lampiran capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2022. T-C 29 (Lampiran I)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tergolong baik, dengan mendapat alokasi belanja langsung dari APBD Provinsi Bali sebanyak Rp. 28.168.313.819,00 dengan realisasi fisik 96,00% dan keuangan Rp. 25.978.222.561,00 (92,22%).

Analisis Kinerja Pelayanan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dapat diuraikan sebagai berikut : Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali merupakan Dinas yang tidak mengukur kinerjanya berdasarkan SPM, tetapi menggunakan NSPK dan IKK serta IKU.

Untuk jelasnya berikut disajikan dalam tabel T-C 29 (lampiran I) dan tabel T-C 30.

Tabel T-C 30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Bali Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	2022		% Capaian	Ket
			Target	Realisasi		
1	Terwujudnya Sentra-Sentra Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan yang di hasilkan	124.147,7 1 Ton	127.481,4 7 Ton	103 %	
2	Meningkatnya daya saing produk perikanan	Jumlah ekspor produk perikanan	26.825,31 Ton	26.468,46 2 Ton	99 %	
2	Meningkatnya pengelolaan ruang laut	Jumlah pemanfaatan ruang laut	4 Kawasan	2 Kawasan	50 %	

2.3 Review terhadap RKPD

Dalam Review terhadap RKPD diuraikan sebagai berikut: Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan terutama hasil capaian kinerja tahun 2022 dan kebutuhan tahun 2024. Alasan proses tersebut dilakukan; untuk menjamin kesinambungan program dan kegiatan serta menyesuaikan antara kinerja program dan kegiatan, kemampuan keuangan serta kebutuhan program dan kegiatan tahun 2024.

Temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan Provinsi Bali tahun 2024, tidak perlu mengusulkan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan Beberapa indikator berbeda karena mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Lampiran II Tabel T-C 31).

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Forum Konsultasi Publik ada beberapa Usulan Masyarakat yang perlu ditelaah. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut : hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten maupun yang diusulkan ke Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan sebagai berikut :

1. Usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh secara lisan maupun tertulis di masukan dalam daftar panjang;
2. Oleh Tim Penyusun Renja disusun sesuai dengan skala prioritas yang pada nantinya akan dibahas dalam Musrenbang menjadi daftar pendek.

Tabel T-C 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Provinsi Bali

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Denpasar	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai	<i>Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat</i>
2	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	8 Kabupaten/ Kota di Bali	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	44 %	<i>= (Jumlah Luas Kawasan Konservasi yang sudah ditetapkan / Jumlah luas kawasan konservasi berdasarkan RZWP3K) x 100%</i>
			Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	71 %	<i>= (Potensi PAD di kawasan Konservasi/jumlah PAD Dinas Kelautan dan Perikanan) x 100%</i>
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	8 Kabupaten/ Kota di Bali	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2 %	<i>= ((Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Berjalan - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya)/ Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya x 100%)</i>
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	9 Kabupaten/ Kota di Bali	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2 %	<i>= ((Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n - Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1)/ Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1 x 100%)</i>

5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Provinsi Bali	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	2 %	<i>Persentase Kepatuhan Pelaku usaha (PKPU) = $(KPU/JKPU) \times 100\%$ KPU adalah jumlah pelakun usaha yang patuh pada tahun berjalan JKPU adalah Jumlah pelaku usaha yang terdata pada tahun berjalan</i>
6	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Provinsi Bali	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	2 %	<i>= ((Jumlah produksi olahan produk perikanan Tahun n - Jumlah Produksi olahan produk perikanan Tahun - n)/Jumlah Produksi olahan produk perikanan tahun -n x 100%)</i>
			Tingkat Konsumsi Ikan	48,68 Kg/ Kapita/ Tahun	<i>AKI = A+B+C AKI =Angka Konsumsi Ikan A = Konsumsi di rumah tangga (KIDRT) B = Konsumsi di luar rumah tangga C = Konsumsi tidak tercatat</i>
			Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	2 %	<i>= ((Jumlah sample yang di uji Tahun n - Jumlah sample yang di uji Tahun - n)/Jumlah sample yang di uji tahun -n x 100%)</i>

Untuk jelasnya terkait dengan usulan program/kegiatan/sub kegiatan beserta masukan dan saran dari para Pemangku Kepentingan di buat kedalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Untuk menyusun Tujuan dan Sasaran diperlukan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan mengacu pada RPD Provinsi Bali 2024-2026. Selanjutnya pada Pada Bab III Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali diuraikan hal-hal sebagai berikut : 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, 2) Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah, dan 3) Program dan Kegiatan.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN disusun telaahan kebijakan Kelautan dan Perikanan pada Perpres Nomor 2 tahun 2015 tentang RPJMN. Arah Kebijakan Kelautan dan Perikanan pada RPJMN secara ringkas adalah : Mendukung ketahanan pangan, daya saing dan nilai tambah Kelautan dan Perikanan serta memelihara keberlanjutan pembangunan.

Terkait dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan serta isu strategis yang berkembang, maka ada beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali adalah Menurunkan tingkat kemiskinan Krama Bali dengan indikator Angka Kemiskinan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah

Tujuan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali yang menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Bali Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya perekonomian Krama Bali;
2. Terwujudnya stabilitas harga-harga kebutuhan bahan pokok.

Sasaran untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
2. Meningkatnya Sektor Kelautan Terhadap PDRB;
3. Meningkatnya kesejahteraan Nelayan;
4. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

3.3 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, dikembangkan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan. Program kegiatan dan sub kegiatan Kelautan dan Perikanan berisikan penjelasan mengenai : a.Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, b.Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, dan c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/ kegiatan/ sub kegiatan. Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dapat diamati pada (lampiran III tabel T-C 33).

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI BALI

Pada Bab IV tentang Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan seluruh Program/Kegiatan yang terdapat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali maka dibutuhkan dana sebesar Rp. 41.796.406.238,00. Program – program tersebut diuraikan sebagai berikut:

- | No | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN |
|-----------|---|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |
| | 1 <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> |
| | 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | 2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD |
| | 3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD |
| | 4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD |
| | 5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD |
| | 6 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| | 2 <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> |
| | 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |
| | 3 <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> |
| | 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |
| | 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |
| | 3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor |
| | 4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan |
| | 5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| | 6 <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> |
| | 1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |
| | 7 <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> |
| | 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| | 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |
| | 8 <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> |

- 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2 PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**
- 1 *Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi***
 - 1 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 2 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat
 - 3 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 2 *Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi***
 - 1 Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional
 - 3 *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil***
 - 1 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 2 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 3 Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 4 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- 3 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**
- 1 *Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil***
 - 1 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
 - 2 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
 - 2 *Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT***

- 1 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT
- 3 *Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi***
 - 1 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
 - 2 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan
- 4 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**
 - 1 *Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi***
 - 1 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan
 - 2 *Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut***
 - 1 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut
 - 2 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 3 *Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat***
 - 1 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - 2 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- 5 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**
 - 1 *Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil***
 - 1 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil
 - 2 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
 - 3 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil
 - 4 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)
 - 2 *Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi***

- 1 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

6 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

1 *Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi*

- 1 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

2 *Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar*

- 1 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
- 2 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing

BAB V

PENUTUP

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 ini, kiranya dapat dipergunakan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sesuai dengan Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan beserta Indikator dan Target yang telah ditetapkan sehingga tercapainya Pembangunan Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Rencana Strategis.

Demikianlah Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 disusun, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024 semoga ada manfaatnya dalam meningkatkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2024, Terima kasih.

Denpasar, 04 Agustus 2023

**Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan Provinsi Bali**



I. PUTU SUMARDIANA, MP

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19670714 199403 1 003

3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	416.365.076	12	107.123.663	0	Bulan	0	0	0	0,00%	0,00%	12	107.123.663,00	100%	26%		
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100%	6.464.334.403	100%	1.252.666.531	100%	Persen	1.575.665.476	100%	1.559.518.502	100,00%	98,98%	100%	2.812.185.032,76	100%	44%		
3	25	01	1.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12	2.407.468.713	12	523.588.024	12	Bulan	533.237.984	12	531.162.599	100,00%	99,61%	12	1.054.750.623,00	100%	44%		
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	12	3.764.640.640	12	690.942.707	12	Bulan	807.877.492	12	795.453.754	100,00%	98,46%	12	1.486.396.461,12	100%	39%		
3	25	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	12	292.225.050	12	38.135.800	12	Bulan	234.550.000	12	232.902.148,64	100,00%	99,30%	12	271.037.948,64	100%	93%		
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah kawasan WP3K yang meningkat Kualitasnya	5	2.060.151.129	5	88.409.946	5	Kawasan	147.182.196	5	146.925.676	100,00%	99,83%	5	235.335.622,00	100%	11%		
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi.	Jumlah Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	5	1.078.000.000	5	45.728.498	0	Kawasan	0	0	0	0,00%	0,00%	5	45.728.498,00	100%	4%		
3	25	02	1.01	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah dokumen perencanaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Bali	3	750.000.000	1	42.517.448	0	Dokumen	0	0	0	0,00%	0,00%	1	42.517.448,00	33%	6%		
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan Penetapan dari Pemerintah	Terlaksananya kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan	5	328.000.000	5	3.211.050	0	Kawasan	0	0	0	0,00%	0,00%	5	3.211.050,00	100%	1%		
3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 1 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pelaku usaha yang memahami izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil	40	300.000.000	40	42.681.448	0	Pelaku Usaha	0	0	0	0,00%	0,00%	40	42.681.448,00	100%	14%		
3	25	02	1.02	02	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Pelaku usaha yang memahami izin lokasi dan izin pengelolaan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi	5	300.000.000	5	42.681.448	0	Kawasan	0	0	0	0,00%	0,00%	5	42.681.448,00	100%	14%		
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya kesejahteraan petani garam	12	682.151.129	0	0	4	Kelompok	147.182.196	4	146.925.676	100,00%	99,83%	4	146.925.676,00	33%	22%		
3	25	02	1.03	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok usaha garam yang difasilitasi	12	682.151.129	0	0	4	Kelompok	147.182.196	4	146.925.676	100,00%	99,83%	4	146.925.676,00	33%	22%		
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap	107.269,84	525.966.592	100.755,76	145.300.248	105.165,51	Ton	569.284.796	103.173,63	568.703.896	98,11%	99,90%	203.929,39	714.004.144,00	190%	136%		
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan dan Terselenggaranya Sosialisasi Perjinan Perikanan Tangkap	3	525.966.592	1	145.300.248	1	Dokumen	569.284.796	1	568.703.896	100,00%	99,90%	2	714.004.144,00	67%	136%		
3	25	03	1.01	01	Penyediaan data dan Informasi Sumber daya Ikan	Penyusunan Data dan Informasi Sumber daya Ikan	8	437.966.592	8	41.606.048	0	Kabupaten	0	0	0	0,00%	0,00%	8	41.606.048,00	100%	9%		
3	25	03	1.01	03	Penjamin Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Nelayan yang Mengikuti Sosialisasi Perizinan Perikanan	3	88.000.000	1	103.694.200	1	Dokumen	569.284.796	1	568.703.896	100,00%	99,90%	2	672.398.096,00	67%	764%		
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya	56.951,04	1.698.076.125	33.455,34	38.306.448	19.360,82	Ton	3.099.640.250	24.307,84	2.549.480.000	125,55%	82,25%	57.763	2.587.786.448,00	101%	152%		
3	25	04	1.05		Pengawasan pembudidayaan ikan di laut	Jumlah Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan	40	1.698.076.125	17	38.306.448	32	Kali	3.099.640.250	32	2.549.480.000	100,00%	82,25%	49	2.587.786.448,00	123%	152%		
3	25	04	1.05	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	10	1.476.076.125	0	0	10	Unit	3.099.640.250	110	2.549.480.000	1100,00%	82,25%	110	2.549.480.000,00	1100%	173%		
3	25	04	1.05	06	Pengelolaan kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di laut dan lintas darat	Jumlah monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan	40	222.000.000	17	38.306.448	0	Kali				0,00%	0,00%	17	38.306.448,00	43%	17%		
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA LAUT DAN PERIKANAN	Jumlah pelaku usaha taat hukum	59	248.945.100	50	18.240.000	0	Pelaku Usaha	0	0	0	0,00%	0,00%	50	18.240.000,00	85%	7%		
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 MIL	Jumlah Pelaku usaha taat hukum	44	165.963.400	23	13.680.000	0	Pelaku Usaha	0	0	0	0,00%	0,00%	23	13.680.000,00	52%	8%		
3	25	05	1.01	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12	Jumlah Pelaku Usaha Bidang Kelautan Yang diawasi	15	82.981.700	13	9.120.000	0	Pelaku Usaha	0	0	0	0,00%	0,00%	13	9.120.000,00	87%	11%		

3	25	05	1.01	02		Pengawasan usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku usaha perikanan tangkap yang diawasi	15	49.881.700	8	3.040.000	0	Pelaku Usaha	0	0	0	0,00%	0,00%	8	3.040.000,00	53%	6%		
3	25	05	1.01	03		Pengawasan Usaha Perikanan Bidang pembudidayaan Ikan di laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pelaku usaha perikanan Budidaya yang diawasi	9	33.100.000	2	1.520.000	0	Pelaku Usaha	0	0	0	0,00%	0,00%	2	1.520.000,00	22%	5%		
3	25	05	1.02			Pengawasan Sumber daya perikanan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas Kabupaten/kota dalam 1 [satu]	Jumlah pelaku usaha taat hukum	15	82.981.700	10	4.560.000	0	Pelaku Usaha	0	0	0	0,00%	0,00%	10	4.560.000,00	67%	5%		
3	25	05	1.02	03		Pengawasan usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 [satu] daerah provinsi	Jumlah pelaku usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang diawasi	15	82.981.700	10	4.560.000	0	Pelaku Usaha	0	0	0	0,00%	0,00%	10	4.560.000,00	67%	5%		
2	25	06				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produk yang bersertifikat	449	1.259.561.984	309	96.744.048	149	SKP	306.356.916	282	287.258.896	189,26%	93,77%	591	384.002.944,00	132%	30%		
2	25	06	1.02			Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan	Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang memenuhi standar	25	1.259.561.984	25	96.744.048	25	UPI	306.356.916	25	287.258.896	100,00%	93,77%	50	384.002.944,00	200%	30%		
2	25	06	1.02	01		Pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	Jumlah Penerima Paket Gemarikan	500	1.259.561.984	200	96.744.048	150	Paket	306.356.916	150	287.258.896	100,00%	93,77%	350	384.002.944,00	70%	30%		
2	25	06	1.03			Kegiatan Penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah produk yang bersertifikat	449	272.264.800	309	13.053.100	0	SKP	0	0	0	0,00%	0,00%	309	13.053.100,00	69%	5%		
2	25	06	1.03	01		Pemetaan dan pemantauan kebutuhan bahan baku usaha pengolahan/distribusi ikan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah penerima paket gemarikan ; Pembinaan mutu dan nilai tambah produk olahan hasil perikanan	100	272.264.800	100	13.053.100	0	Buku	0	0	0	0,00%	0,00%	100	13.053.100,00	100%	5%		
UPTD KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN BALI									2.215.414.365		2.619.866.795			1.742.674.848	548.979.331		31,50%	0	3.168.846.126,46		143%			
2	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	394.914.365	78	1.449.226.078	79	Nilai	596.421.348	79	496.815.831	100,00%	83,30%	79	1.946.041.909,00	99%	493%		
3	25	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	260	0	52	1.355.773.799	52	Dokumen	65.206.000	52	65.206.000	100,00%	100,00%	104	1.420.979.799,00	40%	#DIV/0!		
3	25	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	0	12	1.355.773.799	12	Bulan	65.206.000	12	65.206.000	100,00%	100,00%	12	1.420.979.799,00	100%	#DIV/0!		
3	25	01	1.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	132.597.855	100%	21.701.130	100%	Bulan	25.768.420	100%	16.184.401	100,00%	62,81%	100%	37.885.531,00	100%	29%		
3	25	01	1.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	3.646.125	12	921.000	0	Bulan	0	0	0	0,00%	0,00%	12	921.000,00	100%	25%		
3	25	01	1.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	12	18.751.500	12	9.915.105	12	Bulan	6.682.000	12	5.524.000	100,00%	82,67%	12	15.439.105,00	100%	82%		
3	25	01	1.06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terselenggaranya upacara keagamaan	12	22.619.865	12	9.782.500	12	Bulan	19.086.420	12	10.660.401	100,00%	55,85%	12	20.442.901,00	100%	90%		
3	25	01	1.06			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	6.125.490	12	722.525	0	Bulan	0	0	0	0,00%	0,00%	12	722.525,00	100%	12%		
3	25	01	1.06			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	12	6.250.500	12	360.000	0	Bulan	0	0	0	0,00%	0,00%	12	360.000,00	100%	6%		
3	25	01	1.06			Fasilitas Kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	3.150.000	0	0	0	Bulan	0	0	0	0,00%	0,00%	0	-	0%	0%		
3	25	01	1.06			Penyelenggaraan rapat konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12	72.054.375	0	0	0	Bulan	0	0	0	0,00%	0,00%	0	-	0%	0%		
3	25	01	1.07			Pengadaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100%	5.400.000	100%	5.291.000	0	Bulan	0	0	0	0,00%	0,00%	100%	5.291.000,00	100%	98%		
3	25	01	1.07			Pengadaan sarana prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	5.400.000	12	5.291.000	0	Bulan	0	0	0	0,00%	0,00%	12	5.291.000,00	100%	98%		

3	25	01	1.08		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100%	43.170.000	100%	4.603.550	0	Bulan	0	0	0	0,00%	0,00%	1	4.603.550,00	100%	11%		
3	25	01	1.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	1.500.000	12	450.000	0	Bulan	0	0	0	0,00%	0,00%	12	450.000,00	100%	30%		
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	41.670.000	12	4.153.550	0	Bulan	0	0	0	0,00%	0,00%	12	4.153.550,00	100%	10%		
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100%	213.746.510	100%	61.856.599	100%	Bulan	505.446.928	100%	415.425.430	100,00%	82,19%	100%	477.282.029,00	100%	223%		
3	25	01	1.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12	153.776.885	12	61.856.599	12	Bulan	73.282.000	12	57.208.482	100,00%	78,07%	12	119.065.081,00	100%	77%		
3	25	01	1.09	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	12	47.399.625	0	0	12	Bulan	427.294.928	12	357.667.498	100,00%	83,71%	12	357.667.498,00	100%	755%		
3	25	01	1.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	12	12.570.000	0	0	12	Bulan	4.870.000	12	549.450	100,00%	11,28%	12	549.450,00	100%	4%		
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1	1.820.500.000	1	1.170.640.717	1	Kawasan	1.146.253.500	1	52.163.500	100,00%	4,55%	1	1.222.804.217,46	100%	67%		
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampal 12 Mil Diliuar Minyak dan Gas Bumi	Terlaksananya pengelolaan kawasan konservasi perairan	1	1.820.500.000	1	1.170.640.717	1	Kawasan	1.146.253.500	1	52.163.500	100,00%	4,55%	1	1.222.804.217,46	100%	67%		
3	25	02	1.01	02	Pengelolaan kawasan Konservasi di Wilayah pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Jumlah Kawasan Konservasi yang dikelola	1	1.820.500.000	1	1.170.640.717	1	Kawasan	1.146.253.500	1	52.163.500	100,00%	4,55%	1	1.222.804.217,46	100%	67%		
UPTD PELABUHAN PERIKANAN								920.653.083		1.781.931.755			275.398.856		252.288.827		91,61%	0	2.034.220.582,00		221%		
3	3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	920.653.083	78	1.781.931.755	79	Nilai	275.398.856	79	252.288.827	100,00%	91,61%	79	2.034.220.582,00	99%	221%		
3	25	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	260	0	52	1.663.435.882	52	Dokumen	74.254.000	52	74.254.000	100,00%	100,00%	104	1.737.689.882,00	40%	#DIV/0!		
3	25	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	0	12	1.663.435.882	12	Bulan	74.254.000	12	74.254.000	100,00%	100,00%	12	1.737.689.882,00	100%	#DIV/0!		
3	25	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	297.993.300	100%	12.586.950	100%	Bulan	45.483.180	100%	41.856.280	100,00%	92,03%	100%	54.443.230,00	100%	18%		
3	25	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	13.650.000	12	1.305.500	0	Bulan	0	0	0	0,00%	0,00%	12	1.305.500,00	100%	10%		
3	25	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	46.895.940	12	9.316.950	12	Bulan	6.700.380	12	5.894.370	100,00%	87,97%	12	15.211.320,00	100%	32%		
3	25	01	1.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	103.782.800	0	0	12	Bulan	38.782.800	12	35.961.910	100,00%	92,73%	12	35.961.910,00	100%	35%		
3	25	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	6.466.560	12	1.334.500	0	Bulan	0	0	0	0,00%	0,00%	12	1.334.500,00	100%	21%		
3	25	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undang	12	1.800.000	12	630.000	0	Bulan	0	0	0	0,00%	0,00%	12	630.000,00	100%	35%		
3	25	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12	125.398.000	0	0	0	Bulan	0	0	0	0,00%	0,00%	0	-	0%	0%		
3	25	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100%	60.281.239	100%	7.220.875	0	Bulan	0	0	0	0,00%	0,00%	100%	7.220.875,00	100%	12%		
3	25	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	60.281.239	12	7.220.875	0	Bulan	0	0	0	0,00%	0,00%	12	7.220.875,00	100%	12%		
3	25	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100%	562.378.544	100%	98.688.048	100%	Bulan	155.661.676	100%	136.178.547	100,00%	87,48%	100%	234.866.595,00	100%	42%		

3	25	01	1.09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	278.096.000	12	41.814.600	12	Bulan	64.148.000	12	57.310.200	100,00%	89,34%	12	99.124.800,00	100%	36%		
3	25	01	1.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	284.282.544	12	56.873.448	12	Bulan	91.513.676	12	78.868.347	100,00%	86,18%	12	135.741.795,00	100%	48%		
3	25	03				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan	2	376.154.300	1	37.476.448	0	Pelabuhan	0	0	0	0,00%	0,00%	100%	37.476.448,00	50%	10%		
3	25	03	1.06			Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Peningkatan Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap di Pelabuhan	116	376.154.300	60	37.476.448	0	Nelayan	0	0	0	0,00%	0,00%	60	37.476.448,00	52%	10%		
3	25	03	1.06	03		Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya Pelatihan Cara Penanganan Ikan yang Baik dan Terlaksananya Pelatihan Keamanannya Pelatihan Keamanan dan Keselamatan	116	376.154.300	60	37.476.448	0	Nelayan	0	0	0	0,00%	0,00%	60	37.476.448,00	52%	10%		
UPTD PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN									5.999.496.533		2.385.420.436			848.158.871		784.962.378		92,55%	0	3.170.382.814,00	#DIV/0!	53%		
4	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	80	2.648.988.740	78	2.079.690.636	79	Nilai	634.162.271	79	577.512.978	100,00%	91,07%	79	2.657.203.614,00	99%	100%		
3	25	01	1.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	260	0	52	1.555.963.276	52	Dokumen	77.064.587	52	77.064.587	100,00%	100,00%	104	1.633.027.863,00	40%	#DIV/0!		
3	25	01	1.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	0	12	1.555.963.276	12	Bulan	77.064.587	12	77.064.587	100,00%	100,00%	12	1.633.027.863,00	100%	#DIV/0!		
3	25	01	1.06			Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	83.820.000	100%	19.483.350	100%	Bulan	34.688.900	100%	31.189.880	100,00%	89,91%	100%	50.673.230,00	100%	60%		
3	25	01	1.06	02		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	50.325.000	12	3.008.000	0	Bulan	0	0	0	0,00%	0,00%	12	3.008.000,00	100%	6%		
3	25	01	1.06	04		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	15.100.000	12	14.989.600	12	Bulan	34.688.900	12	31.189.880	100,00%	89,91%	12	46.179.480,00	100%	306%		
3	25	01	1.06	05		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	18.395.000	12	1.485.750	0	Bulan	0	0	0	0,00%	0,00%	12	1.485.750,00	100%	8%		
3	25	01	1.08			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100%	760.000.000	100%	176.682.926	0	Bulan	0	0	0	0,00%	0,00%	100%	176.682.926,00	100%	23%		
3	25	01	1.08	01		Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	3.000.000	12	750.000	0	Bulan	0	0	0	0,00%	0,00%	12	750.000,00	100%	25%		
3	25	01	1.08	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	408.000.000	12	62.297.283	0	Bulan	0	0	0	0,00%	0,00%	12	62.297.283,00	100%	15%		
3	25	01	1.08	04		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	349.000.000	12	113.635.643	0	Bulan	0	0	0	0,00%	0,00%	12	113.635.643,00	100%	33%		
3	25	01	1.09			Pemeliharaan Barang milik daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100%	1.805.168.740	100%	327.561.084	100%	Bulan	522.408.784	100%	469.258.511	100,00%	89,83%	100%	796.819.595,00	100%	44%		
3	25	01	1.09	02		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	425.161.984	12	94.569.396	12	Bulan	123.950.096	12	118.812.476	100,00%	95,86%	12	213.381.872,00	100%	50%		
3	25	01	1.09	06		Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	207.880.992	12	45.609.448	0	Bulan	0	0	0	0,00%	0,00%	12	45.609.448,00	100%	22%		
3	25	01	1.09	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	1.172.125.764	12	187.382.240	12	Bulan	398.458.688	12	350.446.035	100,00%	87,95%	12	537.828.275,00	100%	46%		
3	25	01				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah hasil uji yang dikeluarkan	14.850	3.350.507.793	5.039	305.729.800	4.950	Sample	213.996.600	2.695	207.449.400	54,44%	96,94%	7.734	513.179.200,00	52%	15%		
3	25	01	1.02			Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala menengah dan besar	Rekomendasi hasil uji produk perikanan, Terjaganya UPI yang menerapkan persyaratan sertifikasi SNI	14.850	3.350.507.793	5.039	305.729.800	4.950	Sample	213.996.600	2.695	207.449.400	54,44%	96,94%	7.734	513.179.200,00	52%	15%		

3	25	01	1.05	03		Penyediaan prasarana budidaya ikan di air payau dan air tawar yang penguasaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan /atau manfaat auat dampak negatifnya lintas daerah kabupaten kota	tersedianya benih, benih calon induk, calon induk, induk ikan air payau/laut dan ikan air tawar yang unggul	12	1.241.750.969	12	853.180.488	12	Bulan	99.999.770	12	92.443.891	100,00%	92,44%	12	945.624.379,00	100%	76%		
3	25	01	1.05	05		Penyediaan sarana budidaya ikan di air payau dan air tawar yang penguasaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi dan /atau manfaat auat dampak negatifnya lintas daerah kabupaten kota	Tersedianya calon induk dan induk ikan air tawar	12	1.186.866.700	12	2.058.969.995	0	Bulan	0	0	0	0,00%	0,00%	12	2.058.969.994,54	100%	173%		

1. Telaahan Hasil Evaluasi Dinas Kelautan dan Perikanan

1	Program yang target kinerjanya sudah tercapai pada Triwulan II Tahun 2022	:	4	program
2	Kegiatan yang target kinerjanya sudah tercapai pada Triwulan II Tahun 2022	:	7	kegiatan
3	Sub Kegiatan yang target kinerjanya sudah tercapai pada Triwulan II Tahun 2022	:	9	sub kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

- Kurangnya tenaga teknis di dalam pelaksanaan pembinaan pengembangan perikanan tangkap di kabupaten /kota.
- Kurangnya sosialisasi peraturan perizinan
- Kurangnya koordinasi lintas sektoral

Langkah-langkah untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

- Memanfaatkan SDM yang ada
- Melaksanakan sosialisasi baik melalui media sosial maupun daring
- Melaksanakan koordinasi lintas sektoral

2. Telaahan Hasil Evaluasi UPTD Kawasan Konservasi Perairan

1	Program yang target kinerjanya sudah tercapai pada Triwulan II Tahun 2022	:	2	program
2	Kegiatan yang target kinerjanya sudah tercapai pada Triwulan II Tahun 2022	:	4	kegiatan
3	Sub Kegiatan yang target kinerjanya sudah tercapai pada Triwulan II Tahun 2022	:	7	sub kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

- Peningkatan eksistensi KKP Nusa Penida pasca pemindahan kewenangan ke Provinsi Bali
- Personel UPTD KKP Nusa Penida belum semua memahami teknis pengawasan dan monitoring Sumberdaya dan Sosial Ekonomi/patrol di perairan Nusa Penida
- Kurangnya tanda batas zonasi di laut
- Tidak adanya tanda pengenalan tim, seperti seragam yang berlogo provinsi
- Diperlukan media informasi mengenai KKP Nusa Penida
- Kurangnya pendataan dan pemantauan seluruh kegiatan Rehabilitasi karang di Nusa Penida
- Banyaknya isu perusakan dan pencemaran KKP Nusa Penida

Langkah-langkah untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

- Mengadakan sosialisasi di desa pesisir dan kepada pelaku wisata
- Melakukan pelatihan patroli kepada personel UPTD, KKP Bali
- Penambahan anggaran untuk pembuatan tanda batas zonasi dan pembuatan Website UPTD KKP
- Pembuatan bendera patroli dan pembuatan baju seragam UPTD KKP Bali
- Semua pihak yang melakukan kegiatan rehabilitasi karang agar melaporkan kepada UPTD KKP Bali di Nusa Penida
- Peningkatan kegiatan Beach Clean UP dan membentuk TIM Tanggap.

3. Telaahan Hasil Evaluasi UPTD Pelabuhan Perikanan

1	Program yang target kinerjanya sudah tercapai pada Triwulan II Tahun 2022	:	1	program
2	Kegiatan yang target kinerjanya sudah tercapai pada Triwulan II Tahun 2022	:	3	kegiatan
3	Sub Kegiatan yang target kinerjanya sudah tercapai pada Triwulan II Tahun 2022	:	5	sub kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

- Penyerapan anggaran tidak berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
- Kurangnya SDM yang ada di UPTD Pelabuhan Perikanan
- belum maksimalnya produksi tangkapan bagi nelayan yang mendarat di pelabuhan perikanan
- Belum adanya peraturan yang di pakai sebagai acuan di pelabuhan perikanan.

Langkah-langkah untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

- menentukan skala prioritas terhadap pelaksanaan kegiatan di UPTD Pelabuhan Perikanan sesuai tingkat kepentingan atau urgensinya serta sosialisasi Rancangan perda redistribusi.

4. Telaahan Hasil Evaluasi UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan

1	Program yang target kinerjanya sudah tercapai pada Triwulan II Tahun 2022	:	1	program
2	Kegiatan yang target kinerjanya sudah tercapai pada Triwulan II Tahun 2022	:	3	kegiatan
3	Sub Kegiatan yang target kinerjanya sudah tercapai pada Triwulan II Tahun 2022	:	5	sub kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

- 2 perawatan beberapa peralatan yang tidak bisa direalisasikan secara optimal

Langkah-langkah untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

- 2 Menggunakan peralatan yang ada dan masih bisa difungsikan secara optimal

5. Telaahan Hasil Evaluasi UPTD Produksi Perikanan Air Payau/Laut

1	Program yang target kinerjanya sudah tercapai pada Triwulan II Tahun 2022	:	2	program
2	Kegiatan yang target kinerjanya sudah tercapai pada Triwulan II Tahun 2022	:	4	kegiatan
3	Sub Kegiatan yang target kinerjanya sudah tercapai pada Triwulan II Tahun 2022	:	6	sub kegiatan

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

- 1 kreatifitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan uji coba perikanan budidaya
- 2 terbatasnya sarana dan prasarana untuk kegiatan uji coba penerapan teknologi perikanan budidaya seperti misalnya kurang kincir air sebagai supply oksigen pada kegiatan pembesaran calon induk udang galah.

Langkah-langkah untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2022

- 1 Melaksanakan pelatihan sehingga diharapkan ada peningkatan kreatifitas dan inovasi SDM
- 2 penambahan sarana dan prasarana untuk kegiatan uji coba perikanan budidaya seperti misalnya penambahan sarana seperti kincir air, root blower serta adanya bantuan dari Sumber Daya Manusia yang profesional di bidang perikanan

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN

PERIKANAN PROVINSI BALI,



Ir. PUTU SUMARDIANA, MP

Penyelia Utama Muda

NIP. 19670714 199403 1 003

Tabel T-C 31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Provinsi Bali Tahun 2024

No	RKPD Provinsi Bali				Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2024				Catatan
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai	23.748.019.157	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai	23.748.019.157	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	13.680.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	13.680.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	60 Dokumen	20.500.001.173	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	60 Dokumen	20.500.001.173	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	906.173.500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	906.173.500	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100%	182.022.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100%	182.022.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100%	129.540.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100%	129.540.000	

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100%	2.016.602.484		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100%	2.016.602.484	
2	Program Pengelolaan Kelautan Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	44%	192.697.488	Program Pengelolaan Kelautan Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	44%	192.697.488			
		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	102.575,33 Ha	59.999.800		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	102.575,33 Ha	59.999.800	
		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pelaku Usaha yang mengajukan verifikasi teknis kesesuaian ruang	15 Pelaku Usaha	0		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pelaku Usaha yang mengajukan verifikasi teknis kesesuaian ruang	15 Pelaku Usaha	0	
		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan	4 Kelompok	132.697.688		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan	4 Kelompok	132.697.688	
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2%	328.697.688	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2%	328.697.688			
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah produksi perikanan tangkap	103.696,10 Ton	308.697.688		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah produksi perikanan tangkap	103.696,10 Ton	308.697.688	
		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan	8.000 Ton	20.000.000		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan	8.000 Ton	20.000.000	

4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2%	65.000.000	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2%	65.000.000	
	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang terbit	150 Sertifikat	0		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang terbit	150 Sertifikat	0
	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	32645,10 Ton	65.000.000		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	32645,10 Ton	65.000.000
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku		87.478.696	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku			87.478.696
	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	30 Pelaku Usaha	87.478.696		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	30 Pelaku Usaha	87.478.696
	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan kepada unit usaha pengolahan dan distribusi hasil perikanan	20 Unit Usaha	0		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengawasan kepada unit usaha pengolahan dan distribusi hasil perikanan	20 Unit Usaha	0

6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	2%	145.130.892	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	2%	145.130.892		
			Tingkat Konsumsi Ikan	48,68 Kg/Kpt/Th				Tingkat Konsumsi Ikan	48,68 Kg/Kpt/Th			
	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang memenuhi standar izin usaha	25 Unit Usaha	0		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang memenuhi standar izin usaha	25 Unit Usaha	0	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibina	25 Unit Usaha	145.130.892		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibina	25 Unit Usaha	145.130.892	

UPTD PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai	613.227.876	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai	613.227.876	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	49.769.200	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	49.769.200	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100%	32.088.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100%	32.088.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100%	111.052.600	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100%	111.052.600	

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100%	420.318.076		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100%	420.318.076	
2	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya		2%	267.931.592		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	2%	267.931.592	
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas	1.250.000 Ekor	267.931.592		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas	1.250.000 Ekor	267.931.592	

UPTD PENGUJIAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai	879.573.868		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai	879.573.868		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	51.141.700		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	51.141.700	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100%	49.569.500		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100%	49.569.500	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100%	110.592.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100%	110.592.000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100%	668.270.668		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100%	668.270.668	

2	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	2%	252.883.500	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	2%	252.883.500	
	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan	2.500 Rekomendasi	252.883.500		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan	2.500 Rekomendasi	252.883.500

UPTD KAWASAN KONSERVASI PROVINSI BALI

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai	1.272.044.104	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai	1.272.044.104	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	56.154.600		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	56.154.600
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100%	50.000.000		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100%	50.000.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100%	11.992.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100%	11.992.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100%	1.153.897.504		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100%	1.153.897.504

2	Program Pengelolaan Kelautan Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	71%	69.999.500	Program Pengelolaan Kelautan Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	71%	69.999.500	
	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	4 Kawasan	69.999.500		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	4 Kawasan	69.999.500

UPTD PELABUHAN PERIKANAN

1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai	375.537.696	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81 Nilai	375.537.696	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	54.485.800		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	100%	54.485.800
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100%	47.182.500		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	100%	47.182.500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100%	11.992.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	100%	11.992.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100%	261.877.396		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	100%	261.877.396
2	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2%	53.747.600	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	2%	53.747.600	

		Penetapan Lokasi Pembanguna serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan	8.000 Ton	53.747.600		Penetapan Lokasi Pembanguna serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan	8.000 Ton	53.747.600	
					28.351.969.657					28.351.969.657	

Tabel T-C 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Tujuan	Sasaran Strategis (IKU)	Sasaran Antara (IKK)	KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2024		Tahun 2024		Keterangan	
										K	Rp	K	Rp		
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN											28.351.969.657		35.196.417.065		
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN											24.567.023.921		28.911.688.313		
	Meningkatnya manajemen kinerja organisasi						Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	Nilai	81		82				
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81	23.748.019.157	82	23.564.928.452		
			3	25	01	101	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>	<i>Persen</i>	100	13.680.000	100	60.000.000		
			3	25	01	101	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	4	6.840.000,00	4	25.000.000,00	
			3	25	01	101	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	0,00	1	5.000.000,00	
			3	25	01	101	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	0,00	1	5.000.000,00	
			3	25	01	101	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	0,00	1	5.000.000,00	
			3	25	01	101	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	0,00	1	5.000.000,00	
			3	25	01	101	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	6.840.000,00	4	15.000.000,00	
			3	25	01	102		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen	60	20.500.001.173,00	60	21.500.797.916,00	
			3	25	01	102	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	118	20.500.001.173,00	118	21.500.797.916,00	
			3	25	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	906.173.500,00	100	250.712.380,00	
			3	25	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	5	10.565.200,00	5	12.000.000,00	
			3	25	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	7	598.987.800,00	7	10.000.000,00	
			3	25	01	106	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	5	108.990.800,00	5	124.712.380,00	
			3	25	01	106	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	3	26.509.700,00	3	4.000.000,00	
			3	25	01	106	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	161.120.000,00	12	100.000.000,00	
			3	25	01	107		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	182.022.000,00	100	100.000.000,00	

Tujuan	Sasaran Strategis (IKU)	Sasaran Antara (IKK)	KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2024		Tahun 2024		Keterangan	
										K	Rp	K	Rp		
			3	25	01	107	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	182.022.000,00	3	100.000.000,00	
			3	25	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	129.540.000,00	100	6.000.000,00	
			3	25	01	108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	3.000.000,00	12	1.000.000,00	
			3	25	01	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	126.540.000,00	12	5.000.000,00	
			3	25	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	2.016.602.484,00	100	1.647.418.156,00	
			3	25	01	109	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	9	788.974.868,00	9	571.337.984,00	
			3	25	01	109	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	708.897.616,00	3	776.080.172,00	
			3	25	01	109	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	10	518.730.000,00	10	300.000.000,00	
	Mengoptimalkan pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil								Persentase Pemanfaatan Ruang Laut	persen	6%		6%		= (Verifikasi yang dikeluarkan / jumlah perusahaan yang harus mengajukan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) x 100%
	Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan		3	25	02			Program Pengelolaan Kelautan Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil	Persentase pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	persen	44%	192.697.488,00	46%	541.526.531,00	= (Jumlah Luas Kawasan Konservasi yang sudah ditetapkan / Jumlah luas kawasan konservasi berdasarkan RZWP3K) x 100%
	Meningkatnya Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		3	25	02	101		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Luas Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Ha	102.575,33	59.999.800,00	102.575,33	254.001.411,00	
		Tersedianya Regulasi/ Kebijakan tentang RTRW atau Dokumen RZWP-3-K	3	25	02	101	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen	1	59.999.800,00	1	75.320.000,00	
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	101	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	57.862,83	0,00	57.862,83	130.226.311,00	
		Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	101	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	1	0,00	1	48.455.100,00	
		Meningkatnya Pengajuan Varifikasi Teknis Kesesuaian Ruang Perizinan Berusaha	3	25	02	102		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	Jumlah Pelaku Usaha yang mengajukan verifikasi teknis kesesuaian ruang	Pelaku Usaha	15	0,00	20	50.000.000,00	
		Terfasilitasinya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	3	25	02	102	03	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional yang Diterbitkan	Rekomendasi	5	0,00	10	50.000.000,00	
		Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	103		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah kelompok masyarakat pesisir yang di berdayakan	Kelompok	4	132.697.688,00	5	237.525.120,00	
		Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	103	01	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	40	132.697.688,00	50	65.540.000,00	

Tujuan	Sasaran Strategis (IKU)	Sasaran Antara (IKK)	KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2024		Tahun 2024		Keterangan	
										K	Rp	K	Rp		
		Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	103	02	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok	4	0,00	50	71.445.120,00	
		Terlibatnya Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	103	03	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang	40	0,00	5	55.340.000,00	
		Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	3	25	02	103	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok	4	0,00	4	45.200.000,00	
	Meningkatnya kesejahteraan Nelayan								Nilai Tukar Nelayan	Persen	100,22		100,25		Data NTN yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
		Meningkatnya Produktivitas Produksi Perikanan Tangkap	3	25	03			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Persen	2	328.697.688,00	2	647.984.752,00	= ((Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Berjalan - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya)/Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya x 100%)
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	3	25	03	101		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	Jumlah produksi perikanan tangkap	Ton	103.696,10	308.697.688,00	105.770,02	593.984.752,00	Produksi perikanan tangkap
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	3	25	03	101	01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	3	0,00	3	193.658.136,00	
		Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	3	25	03	101	02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit	4	308.697.688,00	4	400.326.616,00	
		Meningkatnya Usaha Perikanan Tangkap	3	25	03	109		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan	Ton	8000	20.000.000,00	8500	54.000.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	3	25	03	110	02	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi	30	20.000.000,00	30	54.000.000,00	
	Meningkatnya Sub Sektor Kelautan Terhadap PDRB								Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB	Persen	5,79		6,02		Data PDRB Sektor Kelautan dan Perikanan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik
		Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya	3	25	04			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Persen	2	65.000.000,00	2	3.188.166.631,00	= ((Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n - Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1)/Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1 x 100%)
		Meningkatnya Produksi perikanan budidaya	3	25	04	01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang terbit	Sertifikat	150	0,00	155	24.580.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	3	25	04	01	03	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Dokumen	1	0,00	1	24.580.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Budidaya Perikanan di Laut	3	25	04	105		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	32.645,10	65.000.000,00	33.297,90	3.163.586.631,00	Produksi perikanan budidaya
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3	25	04	105	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit	5	50.000.000,00	5	3.123.586.631,00	
		Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut	3	25	04	105	06	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat	Dokumen	20	15.000.000,00	30	40.000.000,00	

Tujuan	Sasaran Strategis (IKU)	Sasaran Antara (IKK)	KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2024		Tahun 2024		Keterangan	
										K	Rp	K	Rp		
		Meningkatnya konsumsi dan produksi produk olahan hasil perikanan	3	25	06		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Produksi Olahan Hasil Perikanan	Persen	2%	145.130.892,00	2%	639.081.947,00	= ((Jumlah produksi olahan produk perikanan Tahun n - Jumlah Produksi olahan produk perikanan Tahun -n)/Jumlah Produksi olahan produk perikanan tahun -n x 100%)	
								Tingkat Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Th	46,78		47,72		AKI = A+B+C AKI =Angka Konsumsi Ikan A = Konsumsi di rumah tangga (KIDRT) B = Konsumsi di luar rumah tangga C = Konsumsi tidak tercatat	
		Meningkatnya Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang memenuhi standar izin usaha	3	25	06	101	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang memenuhi standar izin usaha	Unit Usaha	25	0,00	25	295.471.321,00		
			3	25	06	101	3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	1	0,00	1	295.471.321,00	
		Meningkatnya Mutu produk hasil perikanan	3	25	06	102	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Pengolah dan Pemasar yang dibin	Unit Usaha	25	145.130.892,00	30	343.610.626,00		
		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3	25	06	102	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	25	145.130.892,00	30	343.610.626,00	
	Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan							Indeks Kepatuhan (compliance) Pelaku Usaha	Persen	2%		3%		$X_{kp} = (X1 + X2 + X3 + X4) / 4$ X1 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut X2 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan tangkap X3 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan budidaya X4 adalah persentase kepatuhan pelaku usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	
		Meningkatnya pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan	3	25	05		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku	Persen	2%	87.478.696,00	3%	330.000.000,00	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha (PKPU) = (KPU/JKPU) x 100% KPU adalah jumlah pelakun usaha yang patuh pada tahun berjalan JKPU adalah Jumlah pelaku usaha yang terdata pada tahun berjalan	
		Terseleenggaranya pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	3	25	05	101	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	Jumlah Pengawasan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil	Pelaku Usaha	30	87.478.696,00	32	299.542.800,00		
		Terawasinya Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	3	25	05	101	01	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	67.528.696,00	1	37.680.000,00	
		Terawasinya Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	3	25	05	101	02	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	0,00	1	80.138.500,00	
		Terawasinya Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	3	25	05	101	03	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen	1	0,00	1	68.194.500,00	
		Terseadinya Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	3	25	05	101	04	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Terdaftar dan Aktif	Kelompok	40	19.950.000,00	40	113.529.800,00	

Tujuan	Sasaran Strategis (IKU)	Sasaran Antara (IKK)	KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2024		Tahun 2024		Keterangan	
										K	Rp	K	Rp		
		<i>Terseenggaranya kegiatan pengawasan kepada unit usaha pengolahan dan distribusi hasil perikanan</i>	3	25	05	102		<i>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Dusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</i>	<i>Jumlah Pengawasan kepada unit usaha pengolahan dan distribusi hasil perikanan</i>	<i>Unit Usaha</i>	20	0,00	24	30.457.200,00	Persentase Kepatuhan Pelaku usaha (PKPU) = (KPU/JKPU) x 100% KPU adalah jumlah pelaku usaha yang patuh pada tahun berjalan JKPU adalah Jumlah pelaku usaha yang terdata pada tahun berjalan
		Terawasnya Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	3	25	05	102	03	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen	1	0,00	1	30.457.200,00	
UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali											1.342.043.604,00		1.924.079.617,00		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81	1.272.044.104,00	82	1.124.079.617,00	
			3	25	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu</i>	<i>Persen</i>	100	56.154.600,00	100	52.181.200,00	
			3	25	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	2	9.986.800,00	2	7.500.000,00	
			3	25	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.999.100,00	1	6.000.000,00	
			3	25	01	106	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	38.170.000,00	1	38.181.200,00	
			3	25	01	106	05	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Paket	2	1.998.700,00	2	500.000,00	
			3	25	01	107		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik</i>	<i>Persen</i>	100	50.000.000,00	100	15.000.000,00	
			3	25	01	107	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	50.000.000,00	1	15.000.000,00	
			3	25	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik</i>	<i>Persen</i>	100	11.992.000,00	100	2.000.000,00	
			3	25	01	108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.992.000,00	12	500.000,00	
			3	25	01	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	10.000.000,00	12	1.500.000,00	
			3	25	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik</i>	<i>Persen</i>	100	1.153.897.504,00	100	1.054.898.417,00	
			3	25	01	109	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	81.210.900,00	5	82.211.113,00	
			3	25	01	109	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	962.686.804,00	1	962.687.304,00	
			3	25	01	109	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	109.999.800,00	1	10.000.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang lestari dan berkelanjutan	3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	<i>Persentase Efektifitas Kawasan Konservasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah</i>	<i>persen</i>	71%	69.999.500,00	73%	800.000.000,00	= (Potensi PAD di kawasan Konservasi/jumlah PAD Dinas Kelautan dan Perikanan) x 100%
		Meningkatnya Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	101		<i>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil</i>	<i>Jumlah Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan</i>	<i>Kawasan</i>	4	69.999.500,00	5	800.000.000,00	

Tujuan	Sasaran Strategis (IKU)	Sasaran Antara (IKK)	KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2024		Tahun 2024		Keterangan	
										K	Rp	K	Rp		
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	101	02	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha	44.712,50	69.999.500,00	46.838,10	750.000.000,00	
		Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3	25	02	101	03	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha	1	0,00	1	50.000.000,00	
UPTD Pelabuhan Perikanan											429.285.296,00	615.553.500,00			
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81	375.537.696,00	82	248.553.500,00	
			3	25	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	54.485.800,00	100	51.553.500,00	
			3	25	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9.969.400,00	1	7.500.000,00	
			3	25	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	10	6.000.000,00	10	6.000.000,00	
			3	25	01	106	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	36.517.000,00	1	36.053.500,00	
			3	25	01	106	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.999.400,00	2	2.000.000,00	
			3	25	01	107		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	47.182.500,00	100	15.000.000,00	
			3	25	01	107	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	47.182.500,00	1	15.000.000,00	
			3	25	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	11.992.000,00	100	2.000.000,00	
			3	25	01	108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.992.000,00	12	500.000,00	
			3	25	01	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	10.000.000,00	12	1.500.000,00	
			3	25	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	261.877.396,00	100	180.000.000,00	
			3	25	01	109	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	65.881.500,00	2	70.000.000,00	
			3	25	01	109	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	99.995.896,00	1	100.000.000,00	
			3	25	01	109	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	96.000.000,00	1	10.000.000,00	
		Meningkatnya Produktivitas Produksi Perikanan Tangkap	3	25	03			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Persen	2	53.747.600,00	2	367.000.000,00	= ((Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Berjalan - Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya)/Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya x 100%)
		Meningkatnya Usaha Perikanan Tangkap di pelabuhan	3	25	03	106		Penetapan Lokasi Pembanguna serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	Jumlah Produksi Ikan yang didaratkan di pelabuhan	Ton	8000	53.747.600,00	8500	367.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	3	25	03	106	02	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit	50	39.999.600,00	50	117.000.000,00	
		Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	3	25	03	106	03	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan	5	13.748.000,00	5	250.000.000,00	

Tujuan	Sasaran Strategis (IKU)	Sasaran Antara (IKK)	KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2024		Tahun 2024		Keterangan	
										K	Rp	K	Rp		
UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan										1.132.457.368,00		1.906.862.739,00			
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81	879.573.868,00	82	1.529.196.896,00		
			3	25	01	106		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	51.141.700,00	100	104.000.000,00	
			3	25	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	6.052.000,00	1	7.500.000,00	
			3	25	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	10.589.800,00	1	6.000.000,00	
			3	25	01	106	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	32.500.000,00	1	90.000.000,00	
			3	25	01	106	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.999.900,00	2	500.000,00	
			3	25	01	107		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	49.569.500,00	100	15.000.000,00	
			3	25	01	107	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	49.569.500,00	1	15.000.000,00	
			3	25	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	110.592.000,00	100	2.000.000,00	
			3	25	01	108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	1.992.000,00	12	500.000,00	
			3	25	01	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	108.600.000,00	12	1.500.000,00	
			3	25	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	668.270.668,00	100	1.408.196.896,00	
			3	25	01	109	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	4	193.556.792,00	4	193.196.896,00	
			3	25	01	109	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	16	50.460.000,00	16	5.000.000,00	
			3	25	01	109	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	424.253.876,00	1	1.200.000.000,00	
			3	25	01	109	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	2	0,00	2	10.000.000,00	
		Meningkatnya konsumsi dan produksi produk olahan hasil perikanan	3	25	06			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Perikanan	Persen	2%	252.883.500,00	2%	377.665.843,00	= ((Jumlah sample yang di uji Tahun n - Jumlah sample yang di uji Tahun -n)/Jumlah sample yang di uji tahun -n x 100%)
		Meningkatnya Mutu produk hasil perikanan	3	25	06	102		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Uji Mutu Produk Olahan Hasil Perikanan	Rekomendasi	2500	252.883.500,00	2600	377.665.843,00	
		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	3	25	06	102	01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha	30	222.884.500,00	30	297.118.843,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing	3	25	06	102	02	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	Unit Usaha	7	29.999.000,00	7	80.547.000,00	

Tujuan	Sasaran Strategis (IKU)	Sasaran Antara (IKK)	KODE				Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2024		Tahun 2024		Keterangan	
										K	Rp	K	Rp		
UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut Provinsi Bali											881.159.468,00		1.838.232.896,00		
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3	25	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81	613.227.876,00	82	729.807.896,00		
			3	25	01	106	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	Persen	100	49.769.200,00	100	50.500.000,00		
			3	25	01	106	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	9.955.400,00	1	7.500.000,00	
			3	25	01	106	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	5.318.800,00	1	6.000.000,00	
			3	25	01	106	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	32.500.000,00	1	35.000.000,00	
			3	25	01	106	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.995.000,00	2	2.000.000,00	
			3	25	01	107		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	32.088.000,00	100	15.000.000,00	
			3	25	01	107	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3	32.088.000,00	3	15.000.000,00	
			3	25	01	108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia dengan baik	Persen	100	111.052.600,00	100	2.000.000,00	
			3	25	01	108	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	960.000,00	12	500.000,00	
			3	25	01	108	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	110.092.600,00	12	1.500.000,00	
			3	25	01	109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara dengan baik	Persen	100	420.318.076,00	100	662.307.896,00	
			3	25	01	109	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	5	152.681.792,00	5	152.307.896,00	
			3	25	01	109	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	262.636.284,00	3	500.000.000,00	
			3	25	01	109	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3	5.000.000,00	3	10.000.000,00	
		Meningkatnya Produktivitas Perikanan Budidaya	3	25	04		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Persen	2	267.931.592,00	2	1.108.425.000,00	= ((Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n - Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1)/Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tahun n-1 x 100%)	
		Meningkatnya Pengelolaan Budidaya Perikanan di Darat	3	25	04	106	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	Jumlah induk Unggul dan Benih yang Berkualitas	Ekor	1.250.000	267.931.592,00	1.300.000	1.108.425.000,00	Produksi Perikanan Budidaya pada UPTD P2BAPL	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Darat	3	25	04	106	01	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	2	107.277.600,00	2	800.000.000,00	

Tujuan	Sasaran Strategis (IKU)	Sasaran Antara (IKK)	KODE					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator	Satuan	Rencana Tahun 2024		Tahun 2024		Keterangan	
													K	Rp	K		Rp
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Darat	3	25	04	106	02			Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit	4	160.653.992,00	5	308.425.000,00	



ບໍລິເວນ ກຽມບົດຄວາມ ທາງ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ສະເໜີ ສໍາເລັດສະເໜີ ທາງ

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

ເຂດສໍາເລັດສະເໜີ ກຽມບົດຄວາມ - ທາງ (ບໍລິເວນ) ກຽມບົດຄວາມ (ບໍລິເວນ) ກຽມບົດຄວາມ

JALAN PATIMURA NOMOR 77 DENPASAR – BALI (80234), TELEPON (0361), 223562

WEBSITE: www.diskelkan.baliprov.go.id EMAIL: dislautkan@baliprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

NOMOR : 13 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2023
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

- Menimbang :
- bahwa untuk merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali perlu menyusun Rencana Kerja (RENJA);
 - bahwa untuk kelancaran Penyusunan Rencana Kerja dipandang perlu membentuk Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2043 (Lembar Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 2);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 22);
19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. Menghimpun materi-materi yang terkait dengan pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;

- b. mengolah materi-materi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan menyusun Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali;
- c. menggandakan dan menyampaikan hasil dokumen Rencana Kerja kepada Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali; dan
- d. melaporkan hasil kerja Tim Teknis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 1 Maret 2023
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI BALI,



Ir. Putu Sumardiana, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19670714 199403 1 003

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektorat Provinsi Bali di Denpasar.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
4. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar (3exemplar).
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BALI
NOMOR : 13 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA KERJA
(RENJA) TAHUN 2023 DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA KERJA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali.

Ketua : Sekretaris Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali.

Sekretaris : Perencana Ahli Muda Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali.

Anggota : 1. Kepala Bidang Kelautan
2. Kepala Bidang Perikanan
3. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
4. Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5. Kepala UPTD Kawasan Konservasi Perairan Bali
6. Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan
7. Kepala UPTD Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
8. Kepala UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau/Laut

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 1 Maret 2023
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI BALI,



Ir. Putu Sumardiana, MP
Pembina Utama Muda

NIP. 19670714 199403 1 003